



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI AISYAH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 688683

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.970.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Tanah Seluas 760 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
3. Tanah Seluas 2.660 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
4. Tanah Seluas 10 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	219.700.000
1. MOTOR, HONDA SCOPY SPMR 2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.700.000		
2. MOBIL, TOYOTA TOYOTA 1.2 G A/T(B401RA-GQZFJ) Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	73.042.642
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.262.742.642



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.262.742.642

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.